

EXTERNAL DEBT THE STATE FOR INDONESIA'S ECONOMIC DEVELOPMENT IN PERSPETIVE OF ISLAMIC

Suhety Cindy¹, Nely Rahma Wati², Amalia Rizmaharani³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Metro

Email:nelyrhm@gmail.com

Abstract: *In a country, economic development is the process of how that country can develop. National development is carried out in order to achieve a developed country and make the people there prosperous. Economic development cannot be separated from a country, the process and impact reap many pros and cons in various ways. In its continuity, economic development will not occur without being accompanied by the provision of large capital funds. Often the government brings in funds or, let's say, borrows funds from foreign countries to support the success of economic development. As a result, foreign debt has piled up, hampering economic development. Foreign debt that occurs in developing countries, especially Indonesia, cannot be avoided. Foreign debt occurs due to various factors, one of which is limited human resources that are less effective, which indirectly forces a country to borrow funds from foreign countries because an ineffective workforce does not produce sufficient financial resources for economic development. From an Islamic legal perspective, foreign debt contains the element of usury, why is that because foreign debt always contains interest, in Islam anything that contains usury is clearly not permitted. Of course, the government, especially the Indonesian government, must pay attention to this matter.*

Keywords: *Foreign Debt, Economic Policy, Economic Development*

Abstrak: *Dalam sebuah negara pembangunan ekonomi merupakan proses bagaimana negara itu bisa berkembang. Pembangunan nasional dilakukan agar tercapainya suatu negara yang maju dan membuat masyarakat didalamnya sejahtera. Pembangunan ekonomi tidak terlepas bagi suatu negara, proses dan dampaknya menuai banyak pro dan kontra dalam berbagai hal. Dalam keberlangsungannya, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan tanpa di barengi dengan penyediaan modal dana yang besar. Seringkali pemerintah mendatangkan dana atau sebut saja meminjam dana dari negara asing untuk menunjang keberhasilan suatu pembangunan ekonomi tersebut. Akibatnya terjadilah hutang luar negeri yang menumpuk sehingga menghambat berlangsungnya pembangunan ekonomi. Hutang luar negeri yang terjadi pada negara negara berkembang khususnya Indonesia tidak dapat di hindari. Hutang luar negeri terjadi disebabkan karena berbagai faktor salah satunya terbatasnya sumber daya manusia yang kurang efektif sehingga secara tidak langsung mau tidak mau memaksa suatu negara meminjam dana dari negara asing karena tenaga kerja yang kurang efektif tidak menghasilkan sumber daan yang cukup untuk pembangunan ekonomi. Dalam persepektif hukum islam hutang luar negeri mengandung unsur Riba mengapa demikian sebab dalam hutang luar negeri selalu mengandung bunga, dalam islam segala sesuatu yang mengandung riba jelas tidak diperbolehkan. Tentunya hal ini harus diperhatikan kembali oleh pemerintah, khususnya pemerintah indonesia.*

Kata Kunci: *Hutang Luar Negeri, Kebijakan Perekonomian, Pembangunan Ekonomi.*

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi adalah syarat mutlak bagi sebuah negara untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Upaya pembangunan ekonomi di negara yang umumnya di prakarsai oleh pemerintah agak terkendala akibat kurangnya sumber sumber daya ekonomi yang kurang produktif. Terutama sumber modal yang seringkali menjadi hambatan untuk melakukan sebuah pembangunan ekonomi di suatu negara. Untuk mencukupi kekurangan sumber daya modal pemerintah berusaha mendatangkan sumber modal tersebut dari luar negeri¹

Keberadaan hutang luar negeri hampir tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan negara berkembang seperti halnya indonesia. Secara teoritis hutang luar negeri dapat dibenarkan untuk menutup kelangkaan dana pembangunan *Domestic* yang diharapkan dengan pengelolaan dana secara hati hati dan terarah digunakan untuk membangun proyek pembangunan yang hasilnya untuk membayar cicilan hutang dan bunganya. Peranan hutang luar negeri dalam pembangunan ekonomi di indonesia sebenarnya sudah ejak zaman penjajahan sampai pada pemerintahan orde baru. Hutang luar negeri yang awalnya hanya sekedar sebagai pelengkap dana pembangunan ekarang menjadi beban pembangunan itu sendiri.²

Pembangunan ekonomi merupakan proses keberlanjutan berkembangnya suatu negara. Dalam perkembangannya pembangunan ekonomi tidak lepas dari suatu pro dan kotra. Dalam suatu negara pemerintah merupakan tersangka utama bagaimana pembangunan ekonomi itu bisa berjalan. Disini peran pemerintah sangat penting untuk mempengaruhi jalannya pembangunan nasional guna agar meningkatnya ketersediaan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi dalam arti luas merupakan suatu proses multidimensional yang membahas sebuah perubahan mendasar atas struktur sosial, tingkah laku masyarakat, serta intstitusi nasional. Salah satu penyebab majunya suatu pembangunan ialah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya faktor atau penyebab ini adalah tolak ukur untuk suatu negara bisa berkembang.

Didalam perekonomian, khususnya untuk negara maju maupun berkembang pembangunan ekonomi merupakan jalan menuju majunya sutau negara tersebut. Di indonesia pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat

¹ Imam muklis, "eksternalisasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif teoritis," .

² Faishol Luthfi, "Hutang Luar Negeri Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam," t.t.

didalamnya. Pada umumnya negara berkembang khususnya indonesia mengandalkan dana dari luar negeri untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.³

Sejak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi meningkat secara cepat sehingga menimbulkan taraf hidup masyarakat merosot tajam. Bukan hanya itu banyak penduduk miskin dan meningkatnya pengangguran yang begitu pesat. Akibatnya hal ini menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial. Kemudian dimasa yang akan datang dalam pembangunan ekonomi indonesia akan menghadapi dua tantangan utama terkait dengan globalisasi dan desentralisasi. *Pertama*, Indonesia harus meningkatkan daya saing dan efisiensi kerja melalui daya saing industri nasional. *Kedua*, melakukan desentralisasi ekonomi secara sistematis supaya sumber daya ekonomi pada seluruh daerah di indonesia dapat bergerak secara serempak sehingga menciptakan jiwa wirausaha dan kemampuan berusaha dikalangan masyarakat daerah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penulis memakai metode penelitian yang bersifat normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

C. Kebijakan Perekonomian Dalam Pembangunan Ekonomi.

Dalam pembangunan ekonomi tentu pasti adanya kebijakan didalamnya agar proses pembangunan ekonomi berjalan sesuai literturnya. Yang termasuk kebijakan dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Peranan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat .Terutama untuk rakyat kecil, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu bebrapa usaha agar tercapainya kebutuhan.
2. Peranan Bank Indonesia serta kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam bekerja sama agar berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah di masyarakat.

³ imam muklis, "eksternalisasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif teoritis," hal 1-2.

Sedangkan pada masyarakat kelautan dan perikanan agar dapat mengakses fasilitas yang tersedia untuk aktivitas pemberdaya.

3. Program kemandirian ekonomi pesantren yaitu dengan melalui peningkatan wawasan tentang ekonomi syariah, program kewirausahaan yang diwujudkan melalui pendirian inkubator bisnis syariah, serta program pionir wirausaha pesantren yang dilakukan melalui pendampingan usaha, fasilitasi akses pemasaran, dan fasilitasi akses keuangan. Dalam pemberdayaannya ekonomi tersebut mempunyai prinsip yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pesantren
4. Rencana Pemerintah dalam melakukan program kewirausahaan dengan bekerjasama melalui Bank Indonesia untuk warga serta meningkatkan kapasitas dan merubah mindset pegawai Lembaga kemasyarakatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan teknis kepada petugas kemasyarakatan. Selain itu pelatihan atau pendampingan usaha kepada setiap warga binaan dapat mengembangkan komoditas tanaman pangan dan hortikultura penyumbang inflasi atau komoditas lain yang dapat menunjang perekonomian daerah.
5. Selain itu Bank Indonesia memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menjadikan proyek pembiayaan infrastruktur di negara emerging sebagai tujuan utama pembahasan fora kerja sama internasional. Dalam kaitannya, Bank Indonesia secara langsung terlibat aktif dalam pembentukan Islamic Investment Infrastructure Bank atau World Islamic Investment Bank (WIIB) guna membantu pembiayaan proyek infrastruktur negara anggota IDB.⁴

D. Hutang Luar Negeri Dalam Pembangunan Nasional

Dalam teori konvensional, beberapa teori menjelaskan mengenai hutang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan. Salah satunya dari teori tersebut ialah hutang luar negeri adalah investasi asing yang diperlukan untuk menutup *saving gap*, artinya utang luar negeri sangat berpengaruh karena domestic saving tidak mencukupi untuk pembiayaan pembangunan. Sebagian ilmuwan menyimpulkan bahwa utang luar negeri justru menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara penghutang besar. Sementara study lain menyimpulkan sebaliknya yaitu hutang luar negeri menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mendorong pertumbuhan

⁴ Zakiyah Dan Agus Purnomo, "PENGARUH HUTANG LUAR NEGERI TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH" IV (Deember 2018): 142–43.

ekonomi negara negara penghutang. Secara teoritis hutang luar negeri dapat dibenarkan untuk menutupi kelangkaan dana pembangunan domestic.⁵

Dalam pidato presiden tanggal 16 agustus 1979 menyatakan hutang luar negeri adalah salah satu jalan pintas untuk mempercepat pembangunan nasional supaya bangsa indonesia tidak terjerat dalam masalah kekurangan sumber modal yang menjadikan indonesia sebagai negara dengan penduduk yang termiskin. Utang pada dasarnya salah satu alternatif yang dilakukan karena berbagai alasan yang rasional.⁶

Peran hutang luar negeri dalam upaya pembangunan nasional dapat dijelaskan melalui doktrin pembangunan yang melalui beberapa tahapan sebagaimana model pertumbuhan ekonomi linier *Rostow* dan model pertumbuhan ekonomi *Harrod-Dhomar*. Doktrin ini menjelaskan bahwasannya suatu proses pembangunan ekonomi suatu negara melalui tahapan dari perekonomian yang sederhana kemudian menjadi negara yang maju dimulai dari tahap masyarakat tradisional. Sedangkan dalam penjelasan teori pembangunan ketergantungan (*dependecya*) menerangkan bahwa ketidakmampuan negara berkembang karena adanya tekanan dan eksploitasi dari negara maju. Di sini bantuan luar negeri atau hutang luar negeri merupakan sarana bagi negara maju untuk menguasai negara berkembang. Kondisi ini dirasakan oleh negara indonesia dengan jumlah hutang yang membengkak sehingga kedaulatan ekonomi menjadi kurang leluasa karena harus mengikuti agenda ekonomi yang disodorkan oleh negara pendonor dana sebagai prasyarat.

Aliran modal yang berasal dari luar negeri dapat disebut sebagai utang luar negeri apabila memiliki ciri ciri pokok, yaitu:

1. Aliran modal yang bukan didorong oleh tujuan untuk mencari keuntungan.
2. Dana tersebut diberikan kepada negara penerima atau peminjam dengan syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku di pasaran internasional.

Banyak pemerintah di negara dunia ketiga menginginkan untuk mendapatkan modal asing dalam menunjang pembangunan nasionalnya, tetapi tidak semua berhasil mendapatkannya, kalau pun berhasil jumlah yang didapat akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor antara lain (ML. Jhingan : 1983, halaman 643-646):

⁵ MB Hendrie Anto, "perspektif islam tentang hutang luar negeri dan hutang luar negeri negara islam," t.t.

⁶ muhammad hasan muhammad aziz, *pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat*, 9786025190766 (cv. nur lina, 2018).

1. Ketersediaan dana dari negara kreditur yang umumnya adalah negara-negara industri maju.
2. Daya serap negara penerima (debitur). Artinya, negara debitur akan mendapat bantuan modal asing sebanyak yang dapat digunakan untuk membiayai investasi yang bermanfaat. Daya serap mencakup kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan, mengubah struktur perekonomian, dan mengalokasikan kembali *resources*. Struktur perekonomian yang simultan dengan pendayagunaan kapasitas nasional yang ada akan menjadi landasan penting bagi daya serap suatu negara.
3. Ketersediaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia di negara penerima, karena tanpa ketersediaan yang cukup dari kedua sumberdaya tersebut dapat menghambat pemanfaatan modal asing secara efektif.
4. Kemampuan negara penerima bantuan untuk membayar kembali (*re-payment*).
5. Kemauan dan usaha negara penerima untuk membangun. Modal yang diterima dari luar negeri tidak dengan sendirinya memberikan hasil, kecuali jika disertai dengan usaha untuk memanfaatkan dengan benar oleh negara penerima. Sebagaimana dikatakan Nurkse (1961: 83), bahwa modal sebenarnya dibuat di dalam negeri. Sehingga, peranan modal asing sebenarnya adalah sebagai sarana efektif untuk memobilisasi keinginan suatu negara.

Karena semakin pesatnya pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk secara terus menerus menjadi penggerak utama pembangunan nasional, terutama sejak krisis harga minyak dunia awal tahun 1980-an, menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah deregulasi di berbagai sektor pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada peran serta swasta dalam pembangunan perekonomian Indonesia, melalui peningkatan minat investasi di berbagai sektor pembangunan yang diizinkan. Dengan semakin besarnya minat investasi swasta, tapi tanpa didukung oleh sumber-sumber dana investasi di dalam negeri yang memadai, telah mendorong pihak swasta melakukan pinjaman ke luar negeri, baik dalam

bentuk pinjaman komersial maupun investasi portofolio, yang tentu saja pada umumnya dengan persyaratan pinjaman yang tidak lunak (bersifat komersial), baik suku bunga maupun jangka waktu pembayaran kembali.

Sekarang ini dengan semakin mengglobalnya perekonomian dunia, termasuk dalam bidang finansial, menyebabkan arus modal asing semakin leluasa keluar masuk suatu negara. Pada banyak negara yang sedang berkembang, modal asing seolah-olah telah menjadi salah satu modal pembangunan yang diandalkan. Bahkan, beberapa negara saling berlomba untuk dapat menarik modal asing sebanyak-banyaknya dengan cara menyediakan berbagai fasilitas yang menguntungkan bagi para investor dan kreditur. Khusus modal asing dalam bentuk pinjaman luar negeri kepada pemerintah, baik yang bersifat *grant*; *soft loan*; maupun *hard loan*, telah mengisi sektor penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (*government budget*) yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan proyek-proyek pembangunan negara atau investasi pemerintah di sektor publik. Dengan mengingat bahwa peran pemerintah yang masih menjadi penggerak utama perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang, menyebabkan pemerintah membutuhkan banyak modal untuk membangun berbagai prasarana dan sarana, sayangnya kemampuan finansial yang dimiliki pemerintah masih terbatas atau kurang mendukung. Dengan demikian, maka pinjaman (utang) luar negeri pemerintah menjadi hal yang sangat berarti sebagai modal bagi pembiayaan pembangunan perekonomian nasional. Bahkan dapat dikatakan, bahwa utang luar negeri telah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan perekonomian nasional yang cukup penting bagi sebagian besar negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.⁷

E. Hutang Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam

Di Indonesia, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1990-an, telah menghancurkan perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang fantastis, ternyata begitu ditimpa badai krisis, seluruh bangunan ekonominya runtuh, persatuan nasional rapuh terancam disintegrasi bangsa

⁷ Adwin Surya Admadja, "UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA PERKEMBANGAN DAN DAMPAKNYA" 2 (Mei 2000): 86–87.

seperti Yugoslavia dan negara-negara kawasan Balkan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan lemahnya proses pemulihan, menunjukkan betapa rapuhnya tatanan atau fondasi ekonomi Indonesia yang selama ini dibangun. Praktek monopoli yang dilakukan secara besar besaran otomatis mamatikan usaha-usaha ekonomi kerakyatan, memperluas kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Kondisi ini semakin parah ketika pemerintah mengambil jalan yaitu dengan cara hutang dari negara asing. Tidak hanya itu hutang luar negeri dari negara pendonor banyak dikorup oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.⁸

Dalam bahasa arab *al-qardh* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang telah diutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* sebab ia terputus dari pemiliknya. Demikian yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sebagian harta kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Sedangkan *al-qard* dalam istilah adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.

Jika membahas eknomi banyak sekali fenomena yang terjadi dalam perekonomian di indonesia. Salah satunya adalah utang luar negeri yang merupakan jalan yang ditempu oleh pemerintah untuk membangun sebuah negara. Namun dalam implikasinya, utang luar negeri dilakukan diluar kemaslahatan islam. Banyak yang menyimpang dalam proses utang piutang.

Hutang dalam bahasa arab adalah *ad Dayn* yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Dalam lingkup kebijakan negara hutang dibagi menjadi dua, yaitu hutang negara/pemerintah dan hutang swasta.

1. Hutang pemerintah adalah pinjaman yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Sedangkan hutang swasta adalah pinjaman pihak swasta baik perorangan maupun perseroan.

Banyak negara yang menggunakan sistem budget deficit. Untuk mengatasinya yang bisa dilakukan ialah dengan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan atau meminjam dana baik dari masyarakat atau pihak lain melalui obligasi atau hutang

⁸ Muhajirin, "Konsep Hutang Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," t.t.hal.347

luar negeri. Tentu hal ini berbeda dengan sistem awal pemerintahan islam yang lebih menggunakan sistem tradisional. Konsep ini tidak serumit sistem anggaran modern sehingga secara sederhana konsep ini adalah konsep berimbang dalam pengertian pengeluaran dan penerimaan negara adalah sama.

Pada masa pemerintahan rosululloh dan sahabat, APBN jarang sekali mengalaami yang namanya defisit. Karena pada masa tersebut para pemimpin menggunakan prinsip bahwa pengeluaran dapat dilakuakn hanya ketika adanya sebuah penerimaan. Sistem ekonomi islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Sitem islam selalu dilakukan atas dasar hukum islam. Firman Allah dalam QS.An-Najm ayat 31 yang artinya:

“Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberikan balasan kepada orang orang yang berbuat jahatterhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberikan balasan kepada orang orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik(surga)”.(QS.An-Najm:31)

Utang luar negeri pemerintah indonesia selama ini mengandung riba yaitu lebih tepatnya riba nasiah dimana tambahan dari pengembalian utang yang disyaratkan oleh negara kreditur. Sehingga dalam pandangan islam utang luar negeri saat ini tidak sesuai dengan Al-qur'an dal Al-hadist yang akibatnya menjerat pemerintah indonesia dan salah satu penyebab indonesia belum bisa keluar dari jeratan hutang tersebut.⁹

Kalau kita pelajari lebih dalam ada beberapa hal yang menjadikan utang Luar negeri menjadi bathil. *Pertama*, Utang luar negeri tidak terhindar dari unsur bunga (riba). sangat jelas, dalam islam seala sesuatu yang mengandung riba adalah haram. *Kedua*, terdapat unsur *Riba Qaradl*, yaitu adanya pinjam meminjam uang dari seseorang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman Riba semacam ini dilarang di dalam Islam berdasarkan hadits-hadits berikut :

“Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Burdah bin Musa; ia berkata, “Suatu ketika, aku mengunjungi Madinah. Lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Lantas orang ini berkata kepadaku: ‘Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang di sana praktek riba telah merajalela. Apabila engkau

⁹ Winda Afriyenis, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia,” t.t.

memberikan pinjaman kepada seseorang lalu ia memberikan hadiah kepadamu berupa rumput kering, gandum atau makanan ternak, maka janganlah diterima. Sebab, pemberian tersebut adalah riba". (HR. Imam Bukhari)¹⁰

Ketiga, utang luar negeri banyak menimbulkan berbagai kemudharatan seperti kemiskinan yang semakin hari semakin bertambah, kebutuhan bahan pokok yang mahal, dan permasalahan lainnya. Semua jenis sarana atau perantara yang dapat membawa kemudharatan padahal keberadaannya telah diharamkan adalah haram. *Keempat*, bantuan luar negeri telah membuat negara-negara kapitalis yang kafir dapat mendominasi, mengeksploitasi, dan menguasai kaum muslimin. Ini haram dan tidak boleh terjadi.¹¹

F. Dampak Hutang Luar Negeri Dalam Pembangunan Nasional

Fenomena suatu negara mengalami kesenjangan tabungan-investasi adalah hal yang biasa terjadi di berbagai negara di dunia. Pada waktu tertentu, suatu negara mungkin bisa memenuhi kebutuhan investasi dari tabungan domestiknya, tetapi di lain waktu kemungkinan tabungan domestiknya tidak bisa memenuhi kebutuhan investasinya atau terjadi kesenjangan tabungan-investasi (*saving-investment gap*). Kalau hal ini terjadi, maka dibutuhkan aliran modal dari luar (*capital inflow*) untuk menutup kesenjangan yang ada.

Setiap tindakan ekonomi pasti mengandung dampak dan akibat yang akan mempengaruhi proses berkembangnya suatu pembangunan ekonomi. Begitu halnya yang dilakukan oleh pemerintah negara dalam menarik pinjaman luar negeri. Sejak krisis ekonomi pada tahun 1980an, masalah hutang luar negeri semakin meraja lela dan memburuk. Salah satu negara yang terjerat masalah hutang luar negeri yang rumit adalah indonesia. Banyaknya hutang terhadap negara asing membuat indonesia terjerat dalam berbagai masalah, sehingga masyarakat indonesia merasakan langsung dampaknya. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah kehidupan masyarakat kalangan bawah semakin memburuk. kurangnya sumber dana modal membuat

¹⁰ Dr. imamudin Yuliadi, "ANALIIS HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA PENDEKATAN KESEIMBANGAN MAKROEKONOMI," 2006 vol 11.hal 535

¹¹ Muhammad Jundi Robbani, "Utang Luar Negeri di Pandang Dari SSudut Islam," t. t.

pemerintah indonesia melakukan hutang ke negara asing guna untuk mengembangkan suatu pembangunan nasional.¹²

Utang pemerintah disebabkan oleh tiga faktor yaitu kesenjangan anggaran, kesenjangan investasi dan tabungan serta kesenjangan transaksi berjalan. Kesenjangan anggaran merupakan kesenjangan yang terjadi ketika suatu pendapatan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Sedangkan kesenjangan investasi dan tabungan disebabkan karena tidak cukupnya tabungan dalam membiayai investasi untuk pembangunan. Selain itu kesenjangan transaksi berjalan ialah kesenjangan pembiayaan antara impor dan ekspor barang dan jasa.

Masalah akan semakin bertambah lagi jika aliran modal luar negeri berupa aliran modal yang bersifat jangka pendek. Kalau negara tidak hati-hati dalam mengelolanya, maka dapat mengganggu neraca pembayaran dan cadangan devisa. Karena apabila negara tersebut menganut kebijakan sistem devisa bebas, maka modal mudah untuk keluar atau masuk. Pada saat kondisi perekonomian suatu negara menarik bagi investor asing maka modal akan mudah sekali masuk akan tetapi bila situasi ekonomi dianggap akan memburuk, modal sedemikian cepat ditarik dari negara tersebut. Kalau jumlah modal yang ditarik sangat besar, tentu saja akan mengguncangkan perekonomian negara itu, seperti yang dialami oleh Mexico. Belum lama ini, hal tersebut juga dikhawatirkan akan terjadi di Indonesia karena Indonesia juga menganut kebijakan sistem devisa bebas.¹³

Selain itu hutang luar negeri telah menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi bagi negara penghutang besar. Pembangunan nasional yang semakin hari semakin pesat memaksa pemerintah menaikkan jumlah pinjaman terhadap negara asing akibatnya indonesia mengalami defisit anggaran dimana jumlah hutang lebih banyak sehingga investasi dan tabungan negara tidak mencukupi untuk membayar hutang luar negeri tersebut. Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya hutang luar negeri ialah kurangnya sumber dana modal yang cukup, kualitas tenaga kerja yang kurang produktif sehingga kurang menghasilkan sumber dana yang cukup. pemerintah harus meningkatkan kualitas tenaga kerja yang produktif agar tercapainya pertumbuhan

¹² Nanik Wijayanto Mulyo Budi Setiawan, "Dampak Utang Luar Negeri Dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pra Dan Pasca Krisis moneter," Maret 2006.

¹³ Sri Nawatmi Agung Nusanta, Ali Maskur, "DAMPAK HUTANG LUAR NEGERI DA PENDAPATAN TERHADAP KESENJANGAN TABUNGAN INVESTASI DI INDONESIA," 2009.

ekonomi yang bersih tanpa hutang, menurunkan jumlah hutang luar negeri tahun sebelumnya demi menghindari krisis ekonomi. Selain itu pemerintah harus meningkatkan cadangan devisa guna menjadikan simpanan pemerintah semakin *banyak* dan pada saat tertentu dapat digunakan.¹⁴

Oleh karena itu, setiap negara harus berusaha untuk menutup kesenjangan tersebut agar kebutuhan akan investasinya bisa terpenuhi sehingga target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Untuk menutup kesenjangan tabungan-investasi yang merupakan ekuivalen dengan defisit transaksi berjalan, maka dibutuhkan aliran modal berupa hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang luar negeri secara teoritis bisa berdampak positif maupun negatif terhadap kesenjangan tabungan-investasi begitu juga dengan pendapatan nasional. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai dampak hutang luar negeri dan pendapatan nasional terhadap kesenjangan tabungan-investasi di Indonesia, apakah akan berdampak positif atau negatif.

Kesimpulan

Hutang luar negeri adalah sebagian dari total uang suatu negara yang diperoleh dari kreditor diluar negara tersebut. Dalam sebuah negara hutang adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam keberlangsungan negara tersebut. Masalah hutang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah menjadi bahan perdebatan klasik dalam tataran teoritis maupun praktis. Dalam perspektif islam hutang luar negeri ini menjadi penting disebabkan dua hal yaitu pertama, islam memiliki pandangan yang eksklusif tentang hutang luar negeri. Kedua, banyak negara islam yang terlilit oleh hutang luar negeri itu sendiri.

Untuk itu pemerintah harus menurunkan jumlah hutang terhadap negara asing agar kemakmuran rakyat tetap terjaga serta pembanguna dalam suatu negara tidak terhambat. Di dalam Islam sendiri utang suatu negara itu diperbolehkan apabila memang dalam keadaan yang sangat urgent dan negara sudah tidak mempunyai persediaan cadangan kas sama sekali. Alangkah lebih bijak dan arif bilamana kita dapat memanfaatkan semua sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia untuk menghidupi negara ini bukan mengandalkan dari utang luar negeri yang notabene adalah akal-akalan kaum barat untuk menghancurkan negara ini, dan apabila kita bisa

¹⁴ Dr. Syaparudin, SE, Msi dkk dalam jurnal "*pengaruh hutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia*". Vol. 10. Hal:207

memanfaatkan dengan maksimal segala sumber daya alam yang ada insya allah negara kita menjadi negara maju, makmur, dan sejahtera tanpa utang dari luar negeri.

Daftar Pustaka

- Adwin Surya Admadja. "UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA PERKEMBANGAN DAN DAMPAKNYA" 2 (Mei 2000): 86–87.
- Agung Nusanta, Ali Maskur, Sri Nawatmi. "DAMPAK HUTANG LUAR NEGERI DA PENDAPATAN TERHADAP KESENJANGAN TABUNGAN INVESTASI DI INDONESIA," 2009.
- aziz, muhammad hasan muhammad. *pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat*. 9786025190766. cv. nur lina, 2018.
- Dr. imamudin Yuliadi. "ANALIIS HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA PENDEKATAN KESEIMBANGAN MAKROEKONOMI," 2006.
- Faishol Luthfi. "Hutang Luar Negeri Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam," t.t.
- imam muklis. "eksternalisasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif teoritis," t.t.
- MB Hendrie Anto. "perspektif islam tentang hutang luar negeri dan hutang luar negeri begara negara islam," t.t.
- Muhajirin. "Konsep Hutang Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," t.t.
- Muhammad Jundi Robbani. "Utang Luar Negeri di Pandang Dari SSudut Islam," t.t.
- Mulyo Budi Setiawan, Nanik Wijayanto. "Dampak Utang Luar Negeri Dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pra Dan Pasca Krisis moneter," Maret 2006.
- Winda Afriyenis. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia," t.t.
- Zakiah Dan Agus Purnomo. "PENGARUH HUTANG LUAR NEGERI TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH" IV (Deember 2018): 142–43.